

Petisi Online di Indonesia: Kajian Literatur Partisipasi Politik Warga Berbasis Internet

Andreas Ryan Sanjaya

*Universitas Katolik Soegijapranata
ryansanjaya@unika.ac.id*

Pendahuluan

Salah satu titik tolak besar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998. Atas desakan yang intensif dari warga dan kelompok mahasiswa pada pemerintah, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan mundur dari jabatan presiden. Kursi kepresidenansaat itu lalu dilimpahkan kepada Wakil Presiden BJ Habibie. Sesudah peralihan jabatan tersebut, masa yang sering disebut dengan “pascareformasi”, istilah demokrasi menjadi semakin populer dan dirayakan dalam praktik berbagai bidang di Indonesia.

Secara prosedural, demokrasi tampak pada pemilihan umum legislatif yang diadakan pada tahun 1999. Seiring euforia demokrasi yang seakan tertidur selama 32 tahun kekuasaan Presiden Soeharto, tercatat ada 48 partai yang terlibat dalam pemilihan umum tersebut (KPU, 2008). Kendati banyak protes dilancarkan atas hasil Pemilu 1999 tersebut, kemunculan puluhan partai yang terlibat menunjukkan sebuah kebebasan berpolitik yang menjadi nilai utama dari ideologi demokrasi.

Kebebasan yang lalu menjadi nafas demokrasi tersebut lalu semakin disuburkan oleh kehadiran Internet sebagai teknologi yang mengubah secara radikal kebudayaan manusia di hampir seluruh belahan dunia. Teknologi Internet mengubah cara-cara manusia saling berkomunikasi, termasuk bagaimana warga menyampaikan aspirasi. Fenton (2010) bahkan menuliskan dengan kemampuan Internet dalam mengatasi ruang dan waktu, partisipasi politik yang dilakukan di antara warga berpotensi meningkat.

Potensi partisipasi politik warga tersebut tidak dimaknai terbatas pada bagaimana warga menggunakan hak politiknya sebagai warga

negara untuk dipilih atau memilih dalam praktik pemilihan umum. Lebih dari itu, partisipasi politik dimaknai lebih luas, yakni bagaimana warga memiliki akses untuk menyampaikan pendapat. Dalam maksud ini, termasuk warga dapat menentukan apa yang baik dan apa yang perlu bagi masyarakat, terutama ketika menyangkut instansi atau organisasi yang memiliki pengaruh yang relatif luas bagi kesejahteraan umum.

Dalam pandangan penulis, bentuk partisipasi politik secara luas yang relatif populer dalam beberapa tahun terakhir ini adalah petisi online. Ditilik dari sejarahnya, rakyat Hindia Belanda (sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia) sudah menggunakan petisi untuk mengungkapkan aspirasinya. Meskipun petisi-petisi yang dilaungkan kepada penguasa tersebut tidak selalu berhasil, tetapi aksi ini menjadi titik yang diperhitungkan dalam pergerakan nasional.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji fenomena petisi online di Indonesia sebagai bentuk partisipasi politik warga berbasis Internet. Sebagai gambaran konkret di lapangan, situs yang digunakan sebagai contoh adalah Change.org. Situs tersebut dipilih karena dua pertimbangan. Pertama, karena situs ini memiliki jaringan internasional. Berawal dari Amerika Serikat, situs ini lalu menyebar dan populer di seluruh dunia karena menyediakan wadah yang baik bagi setiap pengguna internet untuk terlibat dalam isu-isu serius. Di Indonesia, situs ini berdiri tahun 2012 dan hingga kajian ini ditulis masih ramai dengan berbagai macam tuntutan warga pada berbagai isu. Kedua, jangkauan situs ini relatif luas dan masih sering digunakan oleh warga. Situs ini menyediakan fasilitas untuk menghubungkan ke jejaring sosial Facebook yang memiliki pengguna aktif di Indonesia sebanyak 111 juta di Indonesia (Liputan6.com, 2017). Dengan pengguna aktif sebanyak itu, setiap pengguna dapat berpartisipasi dalam petisi tersebut tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu.

Fenomena petisi online di Indonesia ini dikaji dengan menggunakan pendekatan kajian literatur. Penulis mengumpulkan beberapa literatur yang memiliki topik tulisan Internet, gerakan sosial, dan partisipasi warga. Secara umum, ketiga topik tersebut berada dalam pandangan yang mendukung praktik demokrasi dalam konteks politis dan sosiologis. Kendati demikian, pada bagian akhir tulisan ini tetap

akan dimasukkan pandangan paradoksal soal penggunaan teknologi Internet di Indonesia oleh warga dalam memenuhi hak berpolitiknya.

Kajian Teori

Pada bagian ini penulis mengonstruksi dua kajian besar yang digunakan untuk membahas fenomena petisi online, yaitu “Internet dan Gerakan Sosial” dan “Partisipasi Politik Melalui Internet”. Kajian yang pertama dipilih karena penulis melihat adanya semangat aktivisme yang tampak dilakukan oleh pembuat petisi dalam Change.org. Pembuat petisi—yang juga disebut dengan “aktivis online”—ini melemparkan sebuah isu dan punya maksud menuntut pihak tertentu untuk melakukan perubahan. Tak lain, yang dilakukannya adalah menginisiasi gerakan sosial di dalam tubuh masyarakat. Sedangkan kajian kedua dipilih karena dari pandangan komunikasi politik, fenomena ini tak lain adalah bentuk partisipasi warga dalam berpolitik. Dengan tanpa menafikan peran partai politik dalam menyalurkan aspirasi, penggunaan petisi online untuk menyampaikan maksud dari sekelompok orang ini juga memiliki efektivitas yang tidak diragukan—meski tidak tanpa kritik. Berikut adalah pemaparan konsep-konsep yang dibangun dalam tulisan ini.

a. Internet dan Gerakan Sosial

Teknologi Internet yang baru marak di Indonesia sekitar satu dasawarsa terakhir rupanya sudah membuat perubahan yang begitu besar. Dalam konteks aktivitas gerakan sosial, perubahan teknologi ini turut mengubah bagaimana warga dan para aktivis berkomunikasi, berkolaborasi, dan berdemonstrasi (Garrett, 2006). Meski demikian, tujuan dari tindakan berkomunikasi secara elektronik ini bukanlah untuk menggantikan komunikasi personal (Schesser, 2006). Hal yang ingin dicapai adalah kesadaran warga untuk berpartisipasi secara politik.

Partisipasi secara politik ini secara konvensional tampak dalam gerakan sosial yang melibatkan banyak orang. Teknologi internet mengubah struktur pergerakan sosial (Donk, Loader, Nixon, & Rucht, 2004). Ketika metode berkomunikasi yang konvensional cenderung mahal dan terpusat, teknologi membuatnya tidak lagi demikian. Teknologi memang bisa memperkuat pengelolaan komunikasi yang

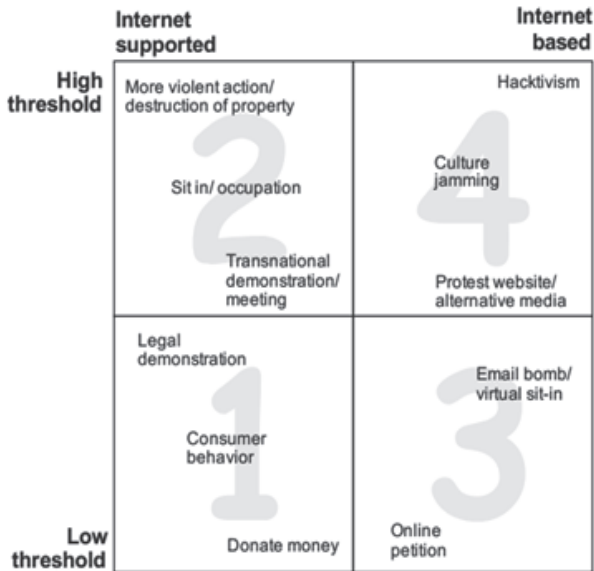
efektif dan terpusat, tetapi bukti empiris juga menunjukkan bahwa teknologi dapat pula digunakan untuk menghubungkan pendapat-pendapat lain dan juga menggerakkan aktivis atau komunitas secara fisik. Sedangkan Romero (2014) mendefinisikan aktivisme digital sebagai bentuk bentuk kontemporer dari partisipasi politik yang dilakukan dengan bantuan Internet melalui media sosial.

Untuk melihat pergerakan sosial kaitannya dengan penggunaan teknologi Internet, Laer dan Aelst (2010) membaginya menjadi dua dimensi yang saling terkait. Dasar pembagian dua dimensi adalah perlunya pembedaan antara aksi 'riil' yang didukung dan difasilitasi oleh Internet dan aksi 'virtual' yang berbasis Internet.

Melalui Gambar 1 dapat diidentifikasi bahwa petisi online ini berada pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini terletak pada ambang batas yang rendah dan model "*Internet based*." Artinya, aksi yang dilakukan oleh para aktivis yang terlibat dalam petisi online ini cenderung tidak radikal bila dibandingkan dengan kuadran dua dan empat. Selain itu aksi tersebut memang benar-benar berdasarkan perkembangan teknologi Internet, gerakan yang ada setelah teknologi tersebut ada. Maka, jelas terlihat bahwa Internet menjadi salah satu hal utama dalam sebuah pergerakan sosial, bukan sebagai alat pendukung aksi.

Penandatanganan petisi online yang difasilitasi oleh Change.org dan situs-situs serupa di Indonesia secara jelas menggambarkan kuadran tiga tersebut. Mereka menggunakan fasilitas ini bukan untuk menggalang bantuan dan mengumpulkan orang untuk aksi di jalan. Mereka benar-benar menggunakan Internet sebagai basis pergerakan hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh perorangan atau lembaga yang dipetisi.

Gambar 1. Diagram Gerakan Sosial dan Internet



Sumber: Laer & Aelst (2010)

Ketika warga melakukan *voting*, menulis surat atau email, bergabung pada aksi demonstrasi, menandatangani petisi, dan kegiatan lain yang dimaksudkan untuk memengaruhi kebijakan, itu artinya mereka sudah melakukan partisipasi politik (Fishkin, 2009). Secara umum politik memang diartikan sebagai usaha untuk menentukan peraturan yang dapat diterima oleh warga, tidak lain adalah upaya untuk membawa masyarakat ke kehidupan bersama yang harmonis (Budiarjo, 2008). Dengan kata lain, kata ‘politik’ memang seringkali dilihat dalam konteks hubungan antara warga dan pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan suatu negara, tindakan-tindakan politik memang menyangkut masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, serta alokasi atau distribusi (Budiarjo, 2008). Tindakan aktivis dan semua warga yang terlibat dalam penandatanganan petisi online mengacu kepada tindakan politik yang tadi disebutkan. Kesadaran warga bahwa mereka secara komunal memiliki kuasa yang lebih besar untuk menekan pemerintah dan lembaga tertentu membuat mereka berkumpul untuk melakukan gerakan. Tekanan itu tentu dimaksudkan untuk memengaruhi

keputusan yang diambil oleh eksekutif dan kebijakan publik yang disusun oleh legislatif.

Warga dan para aktivis ini bisa menggunakan media digital untuk melaporkan apa saja informasi yang mereka ketahui. Dengan kata lain mereka membentuk media independen (Juris, 2005). Dalam konteks politik di Amerika, para aktivis tersebut memegang tugas-tugas berikut: 1) mengirim *e-mail* kepada aktivis lain, keluarga, dan teman mengenai informasi yang beredar di lapangan; 2) menyebarkan informasi terbaru secara resmi; 3) mengunggah foto dan video terkait ke website; dan 4) memberikan pelatihan kepada aktivis untuk memproduksi video dan audio supaya memiliki kualitas yang lebih baik.

Gerakan sosial di Indonesia bisa jadi belum mencapai tingkat penggunaan media baru (dengan dukungan Internet) hingga sejauh itu, tapi gejala-gejala tersebut sudah muncul dan layak diamati. Misalnya, mulai marak tindakan warga pengguna Internet membagikan tautan dengan tujuan mengajak pengguna lain untuk memberikan tandatangannya pada situs penyedia fasilitas petisi online. Artinya, warga mulai menyadari ada hubungan horizontal di antara mereka sendiri yang perlu dibangun untuk mencapai kehidupan bersama.

Hubungan horizontal ini dijelaskan oleh Juris (2005) sebagai pemahaman yang berkaitan dengan upaya mengatur gerakan sosial. Lebih dari itu, pemahaman mengenai hubungan horizontal ini juga menawarkan model yang lebih luas dalam membentuk organisasi alternatif yang bergerak di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Berdasarkan penawaran model tersebut, maka hubungan antara teknologi Internet dengan gerakan sosial menunjukkan keberadaannya sendiri. Selama ini gerakan protes tidak digantikan dengan cara aktif di media sosial. Media sosial diadopsi sebagai cara untuk berkoordinasi, dan lebih-lebih untuk mendokumentasikan aksi supaya menjadi bagian dari gerakan politik di masa depan (Shirky, 2011).

b. Partisipasi Politik Melalui Internet

Hubungan teknologi dengan partisipasi politik warga dalam gerakan sosial paling tidak memunculkan tiga mekanisme yang diajukan oleh Garret (2006). Pertama, teknologi Internet mengurangi biaya bentuk partisipasi yang konvensional. (Garret, 2006; Hanrath & Leggewie, 2012; Aelst & Walgrave, 2004). Biaya yang dimaksud

adalah transaksi partisipasi dalam aksi kolektif. Ketika melakukan aksi secara bersama tanpa bantuan internet, para aktivis setidaknya harus berkumpul beberapa waktu sebelumnya untuk melakukan koordinasi, menggalang dukungan, dan mencetak informasi-informasi. Melalui media baru, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut dapat ditekan. Tentu saja biaya yang dimaksud di sini bukan saja secara finansial, tapi juga mengenai waktu dan tenaga yang dibutuhkan.

Mekanisme kedua adalah mengenai pembentukan identitas kolektif. Garret (2006) menyebutkan identitas kolektif ini dibentuk dengan tujuan warga memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas yang lebih besar. Selama ini dirinya berada pada komunitas 'nyata' yaitu hubungan dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Melalui jaringan Internet, seorang individu dibentuk untuk menyadari bahwa mereka terhubung satu sama lain. Melucci (1996), dalam Vedel (2003), menggarisbawahi dimensi simbolis dari aksi kolektif dan melihat teknologi Internet sebagai pihak yang berkontribusi besar untuk mengkonstruksi identitas dan kode sebuah organisasi. Aelst & Walgrave (2004) juga memandang pentingnya pembentukan identitas kolektif ini. Mereka menyebutkan identitas kolektif sebagai salah satu dasar bagi warga untuk berpartisipasi politik secara luas.

Mekanisme ketiga adalah pembentukan komunitas di mana masing-masing anggota dapat membagi pengalaman dan pendapatnya tentang suatu isu. Mekanisme ini masih berkaitan dengan mekanisme kedua yang menekankan pada aspek kesadaran kolektif. Melalui jaringan Internet, warga yang terlibat dan para aktivis secara tidak langsung diarahkan membentuk sebuah komunitas atau organisasi yang memiliki visi akan suatu hal. Lebih dari itu, dengan membentuk kesadaran berkomunitas, mereka juga memiliki tanggungjawab untuk mengawal isu yang mereka perjuangkan hingga berakhir.

Pembahasan Konseptual dan Empirik

a. Petisi Online di Indonesia: Kasus pada Change.org

Sebagaimana disinggung pada bagian pengantar, penulis menggunakan contoh Change.org sebagai gambaran warga Indonesia

yang menggunakan petisi online untuk mengajukan tuntutan kepada pihak tertentu. Sebagaimana bisa diduga, tidak setiap tuntutan dari pembuat petisi tersebut dapat dikabulkan oleh pihak-pihak yang mereka tuntut. Kendati demikian, setiap keberhasilan tuntutan (berikutnya disebut dengan “kemenangan”) selalu diinformasikan oleh pembuat petisi di dalam situs tersebut.

Berdasarkan informasi yang dicantumkan dalam situs, selama tahun 2017 ini paling tidak tercatat lima kemenangan besar yang diperoleh para aktivis digital. Dalam tulisan ini hanya akan dituliskan dua contoh kemenangan seperti yang dimaksud. Kemenangan pertama diperoleh petisi yang berjudul “*Stop Pidanakan Konsumen dan Segera Bebaskan Acho #AchoGakSalah #StopPidanakanKonsumen*” yang ditujukan kepada 1) Pengelola Apartemen Green Pramuka; 2) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat; dan 3) Kapolda Metro Jaya (Change.org, 2017). Persoalan yang mendorong petisi ini adalah pihak pengelola Apartemen Green Pramuka yang melaporkan konsumen ke kepolisian karena dianggap mencemarkan nama baik melalui tulisan di media sosial. Belakangan kemenangan tersebut dideklarasikan karena, setelah mendapatkan nyaris 31 ribu pendukung dan pemberitaan yang intensif di media-media online, akhirnya pihak pengelola apartemen menulis surat pernyataan untuk mencabut kasus hukum tersebut,

Kemenangan kedua diraih oleh pembuat petisi yang sama dengan petisi berjudul “*Bebaskan Ibu Nuril dari Jerat UU ITE #SaveIbuNuril*.” Petisi tersebut dibuat atas kasus Ibu Nuril yang dipolisikan oleh atasannya menggunakan pasal dalam UU ITE. Padahal, Ibu Nuril tidak berbuat seperti yang dituduhkan. Justru Ibu Nuril berada pada posisi orang yang dilecehkan secara seksual oleh atasannya tersebut. Kemenangan tersebut diperoleh setelah Ibu Nuril dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (Change.org, 2017).

Kebetulan kedua kasus yang disebut di atas sama-sama menyangkut isu hukum. Artinya gerakan petisi online melalui wadah Change.org ini rupanya juga sudah dapat memengaruhi bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam ranah hukum. Namun sebenarnya isu-isu yang diangkat dalam Change.org tidak terbatas pada kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum saja, tetapi juga berhubungan dengan isu perlindungan satwa liar, isu lingkungan, hingga isu politik. Secara

umum, hanya isu politik yang ramai dipertarungkan dalam Change.org. Isu tersebut ramai hanya ketika musim politik di Indonesia (pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden) karena ada banyak kepentingan yang juga dipertarungkan.

Kepentingan barangkali menjadi faktor penting yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk membuat petisi online. Kedua petisi di atas, misalnya, dibuat oleh SAFENet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), yang merupakan jaringan aktivis dan orang-orang dari berbagai profesi yang memiliki tujuan untuk menyuarakan kebebasan untuk berekspresi secara online di kawasan Asia Tenggara. Maka jelas bahwa identitas pembuat petisi online tersebut bukanlah perseorangan, tetapi merupakan kelompok.

Selain kelompok, pembuat petisi online juga bisa jadi merupakan perseorangan. Dalam petisi terbaru berjudul “*AYO LAWAN HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK*” yang ditujukan kepada Ketua DPR RI tercatat pembuat petisi adalah Virgo Sulianto Gohardi (Change.org, 2017). Dari penelusuran sederhana yang dilakukan, Gohardi ini tercatat sebagai pengurus Pemuda Muhammadiyah dan menjabat sebagai Ketua Seni-Budaya, Olah Raga dan Pariwisata. Selain itu Gohardi juga tercatat sebagai Direktur Madrasah Anti Korupsi, sebuah gerakan pendidikan antikorupsi yang digagas di bawah organisasi yang sama. Gerakan ini bekerja sama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan pada organisasi yang terakhir inilah yang tentunya relevan dengan tuntutanannya atas isu KPK melalui wadah petisi online Change.org.

Kemenangan besar kedua petisi online tersebut tak lepas dari viralnya kasus tersebut di berbagai jejaring sosial (Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya). Selain di media sosial, berbagai informasi juga dibagikan melalui aplikasi percakapan seperti LINE dan WhatsApp. Peran kedua jenis teknologi komunikasi ini tidak lagi diragukan membuka mata warganet akan adanya kasus hukum yang terkait dengan kebebasan bersuara di era Internet. Barangkali itulah mengapa dalam situs Change.org terdapat fitur-fitur tertentu untuk membagikan informasi ini melalui berbagai jenis jejaring sosial.

b. Paradoks Penggunaan Internet

Dalam ulasan pada bagian kajian teoritik para peneliti sosial

seakan punya pandangan yang optimis terhadap potensi Internet dalam kehidupan sosial politik sebuah bangsa. Petisi online juga dirasa menjadi solusi atas kebuntuan partisipasi dan mengatasi keterbatasan ruang-waktu-dana yang dimiliki oleh para aktivis. Meski begitu, mereka tetap menuliskan risiko buruk yang muncul akibat pemakaian Internet. Seperti yang sudah diungkapkan di atas, Fishkin (2009) mengatakan bahwa penandatanganan petisi adalah bentuk partisipasi politik. Artinya, dengan berkembangnya fenomena petisi online, partisipasi politik di masyarakat juga dipastikan berkembang pula. Namun ternyata tidak demikian sederhana menyimpulkan kedua hal tersebut.

Pasalnya, penggunaan teknologi Internet mendorong apa yang dinamakan dengan '*individual passiveness*' atau meminjam istilah Morozov '*slacktivism*' (Hanrath & Leggewie, 2012). Kekhawatiran ini berawal dari fenomena membanjirnya gerakan melalui Internet, terutama *Facebook*, yang membahas isu-isu spesifik tapi tidak ada yang bisa menjamin akan ada aksi nyata yang direncanakan. Bahkan ada pula yang menawarkan penerimaan donasi tapi tidak memberikan laporan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana tersebut. Shirky (2011) juga menyoroti fenomena ini. Begitu banyak grup perlawanan di *Facebook* berisi diskusi dan perdebatan yang sia-sia.

Golongan optimis melihat Internet mampu membentuk hubungan positif, menyebarkan informasi, dan mengembangkan kontak antarlembaga politik, kelompok sektarian, dan kesenjangan geografis (Hanrath & Leggewie, 2012). Internet dapat pula digunakan menjembatani opini dan juga memobilisasi kelompok protes secara fisik (Donk, Loader, Nixon, & Rucht, 2004). Selain itu media sosial memberikan kebebasan pada tiap orang. Mereka tidak hanya bisa terhubung secara global, membangun hubungan bisnis, mengungkapkan pendapat dan pandangan, tetapi juga mendorong orang ambil bagian dalam mengisi informasi di media-media (Bute, 2014).

Sementara itu, ketakutan dari golongan pesimis adalah kemampuan Internet untuk membentuk polarisasi yang mendorong risiko informasi yang bias. Internet dan media baru juga dipandang sebagai *public sphere* yang tidak lahir dalam kondisi sosial yang 'hampa udara' melainkan penuh dengan kepentingan dari aktor

terkait (Hanrath & Leggewie, 2012). Fishkin (2009) secara umum juga menyoroti kondisi ini. Menurutnya, Internet memperbesar potensi adanya manipulasi informasi yang beredar di masyarakat. Bahkan, kegelisahan Fishkin menjadi-jadi ketika menuliskan kebebasan dalam Internet ini memungkinkan elite-elite politik untuk membentuk opini lalu mengatasnamakan opini tersebut sebagai demokrasi.

Hanrath dan Leggewie (2012) dengan jelas mengatakan bahwa media baru yang berbasis Internet ini mengurangi rasa takut dan keengganan warga untuk menyampaikan pendapat. Hal ini berangkat dari kondisi empiris warga yang masih enggan untuk menyuarakan pendapat secara terbuka meskipun merasa tidak puas dengan keadaan politik dan negara yang kini sedang mereka hadapi.

Fishkin (2009) secara paradoksal mengingatkan Internet justru membatasi perbincangan atau perdebatan warga. Pembatasan itu terlihat terutama ketika bicara dalam konteks opini publik yang ditimbulkan oleh konten dari media baru. Opini publik yang dapat timbul dari penggunaan internet ini rentan manipulasi. Manipulasi bisa terjadi karena banyak hal, salah satunya adalah rendahnya level pemahaman warga terhadap informasi publik. Lebih dalam lagi Fishkin mengatakan upaya manipulasi opini publik ini dapat berjalan dengan baik pada '*uninformed public*'.

Konten-konten yang ditampilkan dalam media baru dapat menjadi berita bagi media konvensional seperti surat kabar, majalah, dan televisi. Bahkan, dalam observasinya, mereka menemukan bahwa media luar Timur Tengah juga menggunakan media baru sebagai sumber informasi yang paling *update* (Hanrath & Leggewie, 2012). Bute (2014) mengatakan semua hal yang baru pasti menarik perhatian orang-orang, dan semua yang dikomunikasikan di dalam suatu kelompok biasanya mendapatkan lebih banyak perhatian, apresiasi, dan pengakuan. Media sosial adalah media baru dan orang-orang akan menggunakan media untuk mencoba mereka bisa melakukan apa saja dan apa yang disediakan oleh media.

Berkaitan dengan pencapaian jumlah audiens, Rucht (2004) menuliskan pergerakan sosial memiliki pendekatan yang berbeda. Ada pergerakan sosial yang mengutamakan bentuk mobilisasi kualitatif, yang menekankan pada bentuk interaksi tatap muka di antara para

aktivis. Namun, ada juga pergerakan sosial yang mendekatinya dari kuantitas pendukung. Artinya, penggagas gerakan mesti mencari sebanyak mungkin dukungan dari orang-orang. Di sinilah peran media massa menjadi begitu besar. Isu-isu lokal yang sebenarnya hanya relevan bagi sebagian pendukung bisa menjadi isu global dengan jumlah pendukung yang relatif banyak.

Masyarakat, menurut Romero (2014), sesungguhnya juga tidak mudah untuk memberikan dukungan dan menjadi aktivis digital. Setidaknya mereka harus tahu siapa aktor yang menginisiasi gerakan, apa strategi yang dilakukan, dan di mana fokus keberhasilan yang dituju dari gerakan itu sendiri.

Perubahan inilah yang juga menjadi hasil akhir dari apa yang disebut dengan '*political opportunity*' dan '*political process*' (Donk, Loader, Nixon, & Rucht, 2004). *Political opportunity* menekankan pada bentuk mobilisasi dari pergerakan sosial. Bentuk mobilisasi ini artinya berkaitan dengan tindakan aktivis yang menggunakan instrumen dan struktur tertentu untuk membuat perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Sedangkan, *political process* menekankan pada dua hal: 1) interaksi antara pergerakan dan kelompok orang; dan 2) perubahan politik yang juga dipengaruhi oleh pergerakan sosial.

Dalam kasus Change.org, perubahan politik yang dimaksud di atas dapat dilihat dari kemenangan-kemenangan yang dideklarasikan. Namun yang hingga saat ini paradoksal adalah prinsip kebebasan bagi siapapun untuk membuat petisi online. Hal ini selain membawa kekuatan ternyata juga berpotensi melemahkan, karena siapapun dengan berbagai kepentingan yang ada dapat mengajukan tuntutan yang berdasarkan informasi-informasi yang belum dapat diklarifikasi kebenarannya.

Penutup

Akhirnya, tulisan ini secara seimbang berupaya untuk memandang fenomena petisi online sebagai bentuk partisipasi politik warga berbasis Internet. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari uraian di atas dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, perlu digarisbawahi bahwa partisipasi politik warga tidak hanya terbatas pada praktik prosedural dari demokrasi seperti

pemilihan umum. Lebih luas dari itu, partisipasi politik dapat dimaknai ketika warga dapat menyampaikan kehendak dalam rangka pengaturan kehidupan bersama. Penyampaian pendapat tersebut juga tidak hanya terbatas melalui kendaraan partai politik, organisasi penekan, ataupun dalam orasi-orasi di jalanan, melainkan melalui fitur-fitur yang tercipta berkat teknologi Internet.

Kedua, teknologi Internet mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan dana bagi warga untuk menyampaikan pendapat. Dalam kasus ini, penyampaian pendapat yang dimaksud diletakkan dalam konsep gerakan sosial warga. Teknologi Internet mempersingkat berbagai proses mulai dari menyuarakan isu yang dituntut, mengorganisir massa, hingga bagaimana kelanjutan dari setiap tuntutan yang mereka suarakan ke ruang publik.

Ketiga, kehadiran Change.org yang seakan “angin segar” demokrasi ternyata juga tak lepas dari kritik. Selain karena prinsip kebebasan bagi siapapun untuk mengajukan tuntutan, yang tak kalah dari itu adalah munculnya berbagai istilah untuk merendahkan makna aktivisme digital, seperti *individual passiveness*, *slacktivism*, hingga *click-activism*. Istilah-istilah tersebut dekat dengan pereduksian makna yang dilekatkan pada istilah “aktivis” yang erat dengan sifat-sifat militan, keras, dan memegang teguh ideologi tertentu.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Aelst, P. V., & Walgrave, S. (2004). New media, new movements? The role of the internet in shaping the ‘anti-globalization’ movement. Dalam W. V. Donk, B. D. Loader, P. G. Nixon, & D. R. (eds.), *Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements* (hal. 87-108). London: Routledge.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bute, S. (2014). The Role of Social Media in Mobilizing People for Riots and Revolutions. Dalam B. Patrut, & M. P. (eds.), *Social Media in Politics: Case Studies on the Political Power of Social Media* (hal. 355-365). Bacau: Springer.

- Donk, W. v., Loader, B. D., Nixon, P. G., & Rucht, D. (2004). Social Movements and ICTs. Dalam W. v. Donk, B. D. Loader, P. G. Nixon, & D. (. Rucht, *Cyberprotest: New Media, Citizens, and Social Movements* (hal. 1-22). London: Routledge.
- Fishkin, J. S. (2009). *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation*. New York: Oxford University Press.
- Garrett, R. K. (2006). Protest in an Information Society: A Review of Literature on Social Movements and New ICTs. *Information, Communication, and Society*, 9(2) , 202-224.
- Hanrath, J., & Leggewie, C. (2012). Revolution 2.0? The Role of Digital Media in Political Mobilisation and Protest. *World Society and Development* , 37-51.
- Juris, J. S. (2005). The New Digital Media and Activist Networking within AntiCorporate Globalization Movements. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 597 , 189-208.
- Laer, J. V., & Aelst, P. V. (2010). Cyber-protest and civil society: the Internet and action repertoires in social movements. Dalam Y. Jewkes, & M. Y. (eds.), *Handbook of Internet Crime* (hal. 230-254). London: Willan Publishing.
- Romero, L. D. (2014). On the Web and Contemporary Social Movements. Dalam B. Patrut, & M. P. (eds.), *Social Media in Politics: Case Studies on the Political Power of Social Media* (hal. 19-34). Bacau: Springer.
- Rucht, D. (2004). The quadruple 'A': Media strategies of protest movements since the 1960s. Dalam W. V. Donk, B. D. Loader, P. G. Nixon, & D. R. (eds.), *Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements* (hal. 25-48). London: Routledge.
- Schesser, S. D. (2006). A New Domain for Public Speech: Opening Public Spaces Online. *California Law Review*, Vol. 94, No. 6 , 1791-1825.
- Shirky, C. (2011). The Political Power of Social Media: Technology, The Public Sphere, and Political Change. *Council on Foreign Relations* , 1-12.
- Vedel, T. (2003). Political Communication in The Age of Internet. Dalam P. J. Maarek, & G. W. (eds.), *Political Communication in*

A New Era: A crossnational perspective (hal. 41-59). London: Routledge.

Situs Web

KPU. (2008). Pemilu 1999 <http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999> diakses pada 7 September 2017 pukul 11:40 WIB

Liputan6.com. (2017). Indonesia Negara Ke-4 dengan Pengguna Facebook Teraktif di Dunia <http://tekno.liputan6.com/read/2926217/indonesia-negara-ke-4-dengan-pengguna-facebook-teraktif-di-dunia>

Change.org. (2017). *Stop Pidanakan Konsumen dan Segera Bebaskan Acho #AchoGakSalah #StopPidanakanKonsumen.* <https://www.change.org/p/pengelola-greenpramukajkt-stop-pidanakan-konsumen-dan-bebaskan-acho-achogaksalah-stoppidanakankonsumen> diakses 12 September 2017 pukul 19:33

Change.org. (2017). *Bebaskan Ibu Nuril dari Jerat UU ITE #SaveIbuNuril* <https://www.change.org/p/pengadilan-negeri-mataram-bebaskan-ibu-nuril-dari-jerat-uu-ite-saveibunuril/u/20925904> diakses 12 September 2017 pukul 19:45

Change.org.(2017).*AYOLAWANHAKANGKETDPRTERHADAPKPK.* https://www.change.org/p/sn-setyanovanto-kami-menolak-hak-angket-dpr-terhadap-kpk?source_location=discover_feed diakses 13 September 2017 pukul 11:50